

**DETERMINANASI KUALITAS AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN PERSPEKTIF KARAKTERISTIK  
PEMERINTAH DAERAH DAN AUDITOR**

**MAHAMERU ROSY ROCHMATULLAH**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Atma Bhakti Surakarta**

**RUDY HARTANTO**

**DWI RAHAYU**

**Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sebelas Maret**

**ABSTRACT**

*This study discusses about audit quality of Local Government Financial Statements in Indonesia. This study aims to analyze the determinant audit quality of Local Government Financial Statements in Indonesia, if it's seen from the perspective of The Local Government's and the auditors' characteristics. This study uses multiple regression method to 393 districts/ municipalities as a sample selected by purposive sampling method.*

*The result showed that the characteristics of Local Government consisting of the size and complexity of Local Government, then the auditors' characteristics consisting of the auditor's professional proficiency, all three impact on the audit quality of Local Government Financial Statements. Further, the control variable comprising of Local Government Status and Geographic Types also affect audit quality of Local Government Financial Statements. However, the control variable of Local Government Types have no effect on audit quality. So these results prove that besides auditors themselves, the external factors such as the Local Government's characteristics could also impact on the audit quality of Local Government Financial Statements in Indonesia.*

**Keywords:** *Audit Quality, Auditors' Characteristics, Auditor's Professional Proficiency, Local Government's Characteristics, Local Government Complexity, Local Government Financial Statements, Local Government Geographical Types, Local Government Size, Local Government Types.*

**I. PENDAHULUAN**

Perkembangan pemekaran pemerintah di Indonesia semenjak tahun 2005-2013 mengalami perkembangan yang signifikan. Hal tersebut dilihat dari jumlah penambahan

Kabupaten/Kota sejumlah 508 daerah yang terdiri dari 409 kabupaten dan 99 kota di Indonesia. Perkembangan pemekaran pemerintah daerah di Indonesia semenjak tahun 2005-2013 dapat dilihat dari gambar histogram berikut ini:

### **Insert Gambar 1.1**

Dengan adanya pemekaran kabupaten/Kota di Indonesia, pemerintah daerah yang diberi wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri diwajibkan melaporkan pertanggungjawabannya kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Sebagai sarana pertanggungjawaban tersebut, pemerintah daerah diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk setiap periode. Pemekaran pemerintah daerah yang berkembang berdasarkan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam rangka memberikan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah diharuskan membuat pelaporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan UUNo.15/2004 disebutkan bahwa agar dapat mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab perlu dilaksanakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah daerah. Pemeriksaan atau audit yang dilakukan terhadap pemerintah daerah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Audit yang dilakukan oleh BPK-RI terhadap LKPD dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN) yang dikeluarkan dan ditetapkan peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2007. Berdasarkan UU No.15/2004 Pasal 17, laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD berupa:

- 1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

- 2) Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.
- 3) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.
- 4) Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.

Hasil audit yang memberikan rincian tentang temuan audit yang menjelaskan tentang kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidaktaatan terhadap peraturan undang-undang serta informasi mengenai kerugian negara akibat penyalahgunaan dan inefisiensi APBN/APBD dapat digunakan sebagai dasar untuk tindak lanjut audit investigasi terhadap kasus korupsi dan tindak pidana. Dalam mendeteksi kesalahan dalam penyusunan LKPD tergantung pada kompetensi auditor, sedangkan keberanian untuk melaporkan kesalahan tergantung terhadap independensi auditor itu sendiri (Setyaningrum, 2012).

Kualitas audit merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, karena semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan maka semakin tinggi pula laporan keuangan auditan dapat dipercaya dalam pengambilan keputusan (Perdani dan Suranta, 2013). Beberapa penelitian mengenai kualitas audit menunjukkan hasil bahwa kualitas auditor ditentukan dengan kompetensi dan independensi auditor (DeAngelo, 1981a; Lubis, 2009; Batubara, 2008; Singgih dan Bawono, 2010).

Penelitian diatas merupakan penelitian terhadap kualitas audit berdasarkan faktor internal yang berasal dari auditor itu sendiri, sedangkan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas audit yang berasal dari eksternal auditor seperti dari karakteristik entitas yang diaudit, pernah dilakukan oleh Setyaningrum (2012). Penelitian mengenai karakteristik pemerintah daerah yang mempengaruhi kualitas audit, seperti ukuran

pemerintah daerah yang diukur dengan total aset, ditemukan berpengaruh negatif terhadap kualitas audit (Deis dan Giroux, 1992; Setyaningrum, 2012).

Setyaningrum (2012) dalam penelitiannya yang mengkaji mengenai karakteristik pemerintah daerah (meliputi ukuran pemerintah daerah, kompleksitas pemerintah daerah, kualitas audit tahun lalu dan status pemerintah daerah) hanya menunjukkan hasil bahwa kualitas audit tahun lalu dan ukuran pemerintah daerah yang diukur dengan total aset saja yang berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan replikasi penelitian mengenai faktor-faktor determinan yang mempengaruhi kualitas audit dengan menggunakan pengukuran karakteristik pemerintah daerah dan karakteristik auditor dari segi pengukuran yang berbeda.

## II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### A. Landasan Teori

#### 1. *Agency Theory*

Hubungan keagenan dapat didefinisikan sebagai sebuah kontrak, di mana satu pihak atau lebih (prinsipal) melibatkan pihak lain (agen) untuk bertindak atau melakukan beberapa layanan dan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan oleh prinsipal, yang melibatkan pendelegasian beberapa pengambilan keputusan kepada agen (Jensen dan Meckling, 1976; Ross, 1973; Mitnick, 2006; Halim dan Abdullah, 2006). Menurut Eisenhardt (1989), teori keagenan terkait dengan penyelesaian dua masalah yang terjadi dalam hubungan keagenan. Yang pertama adalah masalah keagenan yang muncul ketika (a) keinginan atau tujuan dari konflik keagenan, dan (b) sulit atau mahal nya bagi prinsipal untuk memverifikasi apa yang benar-benar agen lakukan. Masalah di sini adalah bahwa prinsipal tidak dapat memverifikasi bahwa agen telah berperilaku secara tepat. Yang

kedua adalah *risk sharing problem* yang muncul ketika prinsipal dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko. Masalah di sini adalah bahwa prinsipal dan agen dapat memilih tindakan yang berbeda karena preferensi risiko yang berbeda pula. Mitnick (2006) mengidentifikasi konflik keagenan sebagai: 1) masalah prinsipal, 2) masalah agen, 3) mekanisme dan insentif kebijakan. Masalah prinsipal adalah untuk memotivasi agen agar bertindak dengan caranya sehingga dapat mencapai tujuan prinsipal. Alat motivasi disini dapat berupa insentif finansial, prospek sanksi, dan penyediaan informasi guna mengaktifkan norma-norma (seperti loyalitas atau ketaatan) dan preferensi yang terkait dengan tujuan principal. Masalah agen adalah bahwa dia mungkin dihadapkan dengan keputusan untuk bertindak baik dalam kepentingan prinsipal dan kepentingan dirinya sendiri. Mekanisme kebijakan adalah mekanisme dan insentif yang dimaksudkan untuk membatasi kebijakan agen, seperti pengawasan atau tugas yang diarahkan secara khusus.

Mitnick (2006) juga mengidentifikasi norma fidusia sebagai norma sosial umum dan mencatat bagaimana norma-norma tersebut menghemat biaya agensi. Mitnick (2006) memberikan penerapan hubungan sosial seperti konsultan dengan klien, pengacara yang bernegosiasi dengan klien, diplomat dengan pemerintah asing, dan pola-pola perilaku dari perwakilan legislatif, advokasi kelompok kepentingan, dan pemerintah sebagai agen yang tunduk pada kebijakan publik.

Ross (1973) menyebutkan bahwa contoh-contoh hubungan keagenan sangat universal, karena selain terjadi di sektor privat, konflik keagenan juga dapat terjadi di sektor publik (Moe, 1984; Mitnick, 2006). Konflik keagenan dalam sektor publik didalam pemerintah daerah dapat terjadi pada tahap perencanaan dan pelaksanaan (Sutaryo dan Winarna, 2013). Sementara Halim dan Abdullah (2006) berpendapat bahwa konflik keagenan dalam sektor publik dapat terjadi karena adanya perbedaan fungsi antara fungsi eksekutif dan legislatif, dimana eksekutif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan

pelaporan atas anggaran daerah, yang merupakan manifestasi dari pelayanan kepada publik, sedangkan legislatif berperan aktif dalam melaksanakan legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Arifianti et al. (2013) menjelaskan bahwa hubungan rakyat dengan pemerintah daerah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat (*principal*) yang menggunakan pemerintah daerah (*agent*) untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat.

Dalam konteks pembuatan kebijakan oleh legislatif, legislatif adalah prinsipal yang mendelegasikan kewenangan kepada agen seperti pemerintah atau panitia di legislatif untuk membuat kebijakan baru. Hubungan keagenan di sini terjadi setelah agen membuat usulan kebijakan dan berakhir setelah usulan tersebut diterima atau ditolak. Di dalam pemerintahan terdapat keterkaitan antara kontrak-kontrak prinsipal dengan agen yang dapat ditelusuri melalui proses anggaran: pemilih-legislasi, legislasi-pemerintah, perdana menteri-birokrat, dan pejabat-pemberi layanan (Moe, 1984). Terkait hubungan keagenan ini, Moe (1984) dalam risetnya juga menjelaskan bahwa:

*Democratic politics is easily viewed in principal-agent terms. Citizens are principals, politicians are their agents. Politicians are principals, bureaucrats are their agents. Bureaucratic superiors are principals, bureaucratic subordinates are their agents. The whole of politics is therefore structured by a chain of principal-agent relationships, from citizen to politician to bureaucratic superior to bureaucratic subordinate and on down the hierarchy of government to the lowest-level bureaucrats who actually deliver services directly to citizens. Aside from the ultimate principal and the ultimate agent, each actor in the hierarchy occupies a dual role in which he serves both as principal and as agent. The formal apparatus and deductive power of the principal-agent model are applicable to each of these hierarchical stages of government, and might usefully be employed in investigating even the most basic questions of democratic control and performance.*

Dalam rangka mengurangi konflik keagenan diantara prinsipal dan agen, diperlukan pihak ketiga untuk mengurangi konflik tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh prinsipal. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap LKPD dilakukan oleh BPK-RI. Hasil

Pemeriksaan dari BPK-RI bisa berupa opini, temuan, kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi (UU No.15/2004).

## 2. Kualitas Audit

Kualitas audit dapat didefinisikan sebagai berikut “*Audit quality refers to the probability that the auditor will detect misstatements, while auditor independence refers to the probability that the auditor will refuse to support detected misstatements*”. (Lu, Tong, 2006; DeAngelo, 1981a). Kualitas audit dalam penelitian Francis (2004) berpendapat bahwa: “...*that audit quality seems to be at an acceptable level based on the very low incidence of outright audit failures*”. Menurut Khurana and Raman (2004) dalam Giroux and Jones (2011), kualitas audit berfokus pada kompetensi auditor dalam mendeteksi dan mengoreksi kesalahan yang material dalam laporan keuangan. Dengan kualitas yang tinggi, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan dapat dipercaya dalam pengambilan keputusan (Perdani dan Suranta, 2013)

## 3. Karakteristik Pemerintah Daerah

Karakteristik merupakan ciri-ciri khusus yang mempunyai sifat khas yang membedakannya dengan yang lain (Kamus Umum Bahasa Indonesia (2006) dalam Sumarjo, 2010). Karakteristik pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota memiliki keunikan sendiri. Karakteristik pemerintah daerah bisa diukur dengan ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan, belanja daerah (Mustikarini dan Fitriyani, 2012; Puspita dan Martani, 2012). Selain itu dalam penelitian Suhardjanto, Joko dan Yulianingtyas (2011) karakteristik pemerintah dikategorikan sebagai ukuran daerah, jumlah SKPD dan status daerah. Dalam penelitiannya yang lain, Suhardjanto et al. (2010) menggunakan karakteristik daerah, meliputi ukuran daerah, kesejahteraan, *functional differentiation*, umur daerah, latar belakang pendidikan kepala daerah, leverage daerah, dan *intergovernmental revenue*.

Penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Martani (2012) menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingkat ketergantungan yang diukur dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU), sementara Patrick (2007) menggunakan variabel ukuran pemerintah daerah yang diukur dengan total aset pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka peneliti menggunakan proksi variabel karakteristik pemerintah daerah berdasarkan ukuran pemerintah daerah, kompleksitas daerah, status pemerintah daerah, tipe pemerintah daerah, dan tipe geografis pemerintah daerah.

### **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain pernah dilakukan oleh Deis dan Giroux (1992), Setyaningrum (2012), Batubara (2008), dan De Angelo (1981a). Deis dan Giroux (1992) mengkaji mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas audit dengan menggunakan variabel aset. Hasil penelitian Deis dan Giroux (1992) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kualitas audit (De Angelo, 1981a).

Penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum (2012) dan Batubara (2008) menunjukkan adanya perbedaan hasil. Hasil penelitian Setyaningrum (2012) menunjukkan bahwa kecakapan profesional tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan menurut Batubara (2008) kecakapan profesional berpengaruh terhadap kualitas audit. Selain itu, Setyaningrum (2012) juga menguji variabel jenjang pendidikan dan kompleksitas pemerintah daerah, dimana kedua variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

### **C. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dari penelitian ini terkait dengan karakteristik pemerintah dan auditor terhadap kualitas audit dapat di rumuskan sebagai berikut:

#### **Insert Gambar 2.1**

---

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dengan menggunakan variabel independen karakteristik pemerintah daerah (ukuran pemerintah daerah dan kompleksitas pemerintah daerah) dan karakteristik auditor (kemahiran profesional auditor). Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu status pemerintah daerah, tipe pemerintah daerah, dan tipe geografis pemerintah daerah.

#### **D. Pengembangan Hipotesis**

##### **1. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia**

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan disuatu perusahaan yang besar memiliki kemungkinan kecil untuk mengalami kegagalan finansial, sehingga jika dilihat dari perspektif auditor, auditor akan menjadi kurang rajin dalam melakukan pemeriksaan (Setyaningrum, 2012). Pemeriksaan LKPD yang dilakukan oleh BPK-RI memiliki tenggang waktu yang terbatas, padahal dalam pemeriksaan terhadap pemerintah daerah dengan ukuran pemerintah yang berbeda-beda, maka akan diperlukan waktu dan pengalokasian pemeriksaan yang lebih besar pada pemerintah daerah yang berukuran besar jika dibandingkan dengan pemerintah daerah yang memiliki ukurankecil. Ukuran pemerintah daerah dalam penelitian ini yang didasarkan pada total aset menunjukkan bahwa semakin besar aset, maka semakin lama waktu yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan, begitu pula sebaliknya. Hal tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Johnson(2006).

Adanya tekanan waktu untuk menyelesaikan audit, maka pemerintah daerah yang memiliki aset yang besar membuat auditor memiliki kecenderungan menggunakan keyakinan yang tinggi bahwa kepemilikan aset yang besar pasti sudah memiliki kesehatan keuangan yang baik (Johnson, 2006). Dengan tingkat keyakinan yang

tinggi, auditor akan mengurangi bukti audit dan berakibat dan berpengaruh terhadap kualitas audit yang dibuatnya. Maka secara eksplisit dapat dikatakan kualitas auditpun akan menjadi lebih rendah (Setyaningrum, 2012). Atas dasar pertimbangan tersebut, maka rumusan hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>= Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kualitas audit**

### **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia**

## **2. Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia**

Peningkatan kompleksitas klien menuntut adanya peningkatan terhadap pengujian pengendalian internal, pengujian kepatuhan, pengujian substantif, persiapan dalam laporan audit, dan kegiatan lainnya (Johnson, 2006). Semakin kompleks entitas yang diaudit, maka biaya audit akan semakin meningkat dan dana dalam melakukan audit juga akan meningkat (Johnson, 2006).

Menurut Abdullah dalam Setyaningrum (2012), kompleksitas pemerintah daerah dapat dilihat dari perbedaan kabupaten dan kota. Perbedaan tersebut dilihat dari enam aspek yaitu luas wilayah, kependudukan, mata pencaharian penduduk, struktur pemerintahan, sosial budaya dan perekonomian. Struktur pemerintah daerah disebut sebagai Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD yang melaksanakan tugas pemerintah daerah sebagai badan daerah yang dibentuk untuk melayani masyarakat memiliki jumlah SKPD yang berbeda-beda antara pemerintah daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. LKPD yang dibuat oleh pemerintah daerah juga mencakup laporan pertanggungjawaban dari setiap SKPD yang dimilikinya.

Oleh karena itu, semakin banyaknya SKPD yang dimiliki pemerintah daerah, maka akan semakin tinggi pula tuntutan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintah daerah, dikarenakan semakin meningkatnya pelayanan yang

diberikan oleh setiap SKPD. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut:

**H<sub>2</sub> = Kompleksitas Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia**

### **3. Pengaruh Kemampuan Profesional Auditor terhadap Kualitas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia**

Berdasarkan Pernyataan Standar Umum pertama dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 01 Tahun 2007 dinyatakan bahwa “Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan”. Penelitian mengenai kecakapan dan kemampuan auditor menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit (Mardisar dan Sari, 2007). Batubara (2008) juga menemukan pengaruh yang positif dan signifikan antara pendidikan profesional berkelanjutan dengan kualitas audit. Menurut Setyaningrum (2012), melalui pendidikan berkelanjutan, maka akan diperoleh pemahaman akuntansi yang lebih mendalam dan meningkatkan motivasi dalam melakukan audit, yang akan berdampak pula pada meningkatnya kualitas hasil audit. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut:

**H<sub>3</sub> = Kemahiran Profesional Auditor berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia**

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang telah disediakan dan dipublikasikan oleh pihak lain, baik berupa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Website Kementerian Dalam Negeri (<http://otda.kemendagri.go.id/>), Website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (<http://djpk.depkeu.go.id/>) maupun dari sumber terkait yang relevan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2011 yang telah di audit. Penelitian ini menggunakan kriteria pengambilan sampel sebagai berikut:

#### **Insert Tabel III.1**

#### **B. Definisi Operasional Variabel**

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas audit laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2011. Variabel dependen berupa kualitas audit dalam penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setyaningrum (2012). Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah karakteristik pemerintah daerah (ukuran pemerintah daerah dan kompleksitas pemerintah daerah) dan karakteristik auditor (kemahiran profesional auditor). Disamping itu, dalam penelitian ini juga ditambahkan variabel kontrol yang terdiri dari status pemerintah daerah (Daerah Otonomi Baru/Induk), tipe pemerintah daerah (Kabupaten/ Kota), dan tipe geografis pemerintah daerah (Jawa/ luar Jawa). Adapun variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan dalam tabel berikut:

#### **Insert Tabel III.2**

### C. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Metode analisis regresi berganda digunakan karena variabel independennya merupakan kombinasi antara metrik dan nominal (*non-metrik*) (Ghozali, 2011). Regresi berganda digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel independen yang diukur dengan ukuran pemerintah daerah, kompleksitas pemerintah daerah, kemahiran profesional auditor, dan variabel kontrol yang diukur dengan status pemerintah daerah, tipe pemerintah daerah, dan tipe geografis pemerintah daerah memiliki pengaruh dan perbedaan terhadap kualitas audit.

Sesuai dengan kerangka pemikiran dan rumusan hipotesis di atas, maka hipotesis akan diuji dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$QA = \alpha + \beta_0 + \beta_1 \text{UPD} + \beta_2 \text{KPD} + \beta_3 \text{KPA} + \beta_4 \text{SPD} + \beta_5 \text{TPD} + \beta_6 \text{GPD} + \epsilon_i$$

Keterangan :

QA : Kualitas Audit yang diukur dengan jumlah temuan dibagi dengan total aset pemerintah daerah

UPD : Ukuran Pemerintah Daerah yang diukur dengan total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah

KPD : Kompleksitas Pemerintah Daerah yang diukur dengan total SKPD

KPA : Kemahiran Profesional Auditor yang diukur dengan sertifikasi keahlian yang dimilikinya

SPD : Status Pemerintah Daerah (Daerah Otonomi Baru/Induk)

TPD : Tipe Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota)

GPD : Tipe Geografis Pemerintah Daerah (Jawa/Luar Jawa)

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1 - \beta_6$  : Koefisien Regresi

$\epsilon_i$  : *Standard Error*

Adapun langkah-langkah pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian parameter regresi simultan (Signifikansi F), pengujian parameter regresi parsial (Signifikansi-t), pengujian koefisien determinasi ( $R^2$ ), dan pengujian asumsi klasik (uji normalitas, multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas).

#### **IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya di Indonesia. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* sebagai berikut:

##### **Insert Tabel IV.1**

##### **B. Data dan Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/ Kotamadya di Indonesia yang dipublikasi melalui website resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) yaitu [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id) dan Website Kementerian Dalam Negeri (<http://otda.kemendagri.go.id/>), Website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (<http://djpk.depkeu.go.id/>) maupun dari sumber terkait yang relevan. Laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan keuangan yang menyajikan rangkuman TLHP SPI yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

##### **C. Analisis Deskriptif**

Analisis deskriptif dalam penelitian ini memberikan gambaran mengenai variabel dependen berupa kualitas audit, variabel independen berupa ukuran pemerintah daerah, kompleksitas pemerintah daerah, kemahiran profesional auditor serta variabel kontrol berupa

status pemerintah daerah, tipe pemerintah daerah dan tipe geografis pemerintah daerah. Berikut merupakan gambaran statistik deskriptif dalam penelitian ini.

#### **Insert Tabel IV.2**

Berdasarkan Tabel IV.2 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata kualitas auditor adalah sebesar 0,0069. Hal tersebut berarti persentase kualitas audit rata-rata sebesar 0,69% yang berarti jika dikaitkan dengan kualitas audit yang diukur dengan jumlah temuan menunjukkan bahwa temuan audit dalam LKPD semakin baik dikarenakan persentase yang kecil atau juga bisa diartikan dengan kualitas audit hanya sebesar 0,69 dikarenakan auditor tidak dapat menemukan kesalahan dalam LKPD. Ukuran pemerintah daerah yang diukur dengan total aset menunjukkan bahwa rata-rata total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebesar 2,038 triliun. Sedangkan jumlah SKPD rata-rata menunjukkan sebesar 52 SKPD yang ada di pemerintah daerah.

### **D. Pengujian Hipotesis**

#### **1. Pengujian Asumsi Klasik**

Model regresi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah model yang dipakai menyimpang atau tidak, dan representatif atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. Pada saat peneliti melakukan pengujian asumsi klasik, terlihat bahwa data tidak terdistribusi normal, sehingga dilakukan proses outlier pada 164 data. Sehingga diperoleh data sebanyak 229 data. Hasil Pengujian asumsi klasik bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

#### **Insert Tabel IV.3**

## 2. Analisis Regresi Berganda

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, berikut pembahasan mengenai hasil dari pengujian dalam penelitian ini:

### a) Model Regresi

Model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### Insert Tabel IV.4

Tabel IV.4 di atas menunjukkan bahwa nilai dari *probability value* model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 0,000. Besarnya nilai tersebut mengindikasikan bahwa tingkat signifikansinya lebih kecil dari 5% yang menyatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai model regresi dalam pengujian hipotesis.

### b) Uji Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi sendiri adalah antara nol dan satu. (Ghozali, 2011). Berikut hasil koefisien determinasi dari penelitian ini:

#### Insert Tabel IV.5

Hasil pengujian dari koefisien determinasi pada Tabel IV.5 di atas menunjukkan bahwa nilai Adjusted  $R^2$  sebesar 0,285 atau sebesar 28,5%. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa variabel independen UPD, KPD, dan KPA mampu menjelaskan variabel dependen QA sebesar 28,5%. Sementara sisanya sebesar 71,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

### c) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Berikut merupakan hasil uji signifikansi t dalam penelitian ini:

#### Insert Tabel IV.6

Hasil pengujian pada Tabel IV.6 di atas menunjukkan bahwa nilai Sig. untuk hipotesis pertama yaitu UPD sebesar 0,000. Nilai Sig. untuk KPD yang diukur

dengan jumlah SKPD sebesar 0,000. Nilai Sig. untuk KPA yang diukur dengan kemampuan auditor berdasarkan sertifikasi yang dimiliki adalah sebesar 0,007. Dari besarnya ketiga nilai Sig. untuk variabel independen tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketiga hipotesis tersebut diterima. Sedangkan untuk variabel kontrol menunjukkan bahwa SPD memiliki nilai Sig. sebesar 0,068 dan GPD sebesar 0,000 berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan nilai Sig. TPD yang sebesar 0,112 tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

## **E. Pembahasan**

Hasil penelitian mengenai kualitas audit pada hipotesis pertama menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima. Variabel ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap total aset, yang artinya bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah yang ditunjukkan dengan total aset, maka akan semakin rendah kualitas audit. Variabel ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan pada tingkat signifikansi 1% yaitu sebesar 0,000. Hasil dari hipotesis pertama ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum (2012) dan Batubara (2008).

Hasil pengujian pada hipotesis kedua juga menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima. Artinya bahwa kompleksitas pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Pengukuran kompleksitas daerah dalam penelitian ini menggunakan jumlah SKPD, yang berarti bahwa semakin besar SKPD, maka semakin tinggi tuntutan akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil pengujian analisis regresi pada hipotesis ketiga juga menunjukkan bahwa hipotesis ketiga diterima. Artinya bahwa kemahiran profesional auditor berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan dalam audit LKPD. Hasil dari pengujian hipotesis

ketidakonsistendengan penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum (2012) dan tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Batubara (2008).

Variabel kontrol yang berupa SPD dan GPD dalam penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan variabel kontrol TPD tidak menunjukkan pengaruh terhadap kualitas audit. Dalam variabel kontrol SPD yang diukur dengan melihat dari status pemerintah daerah apakah merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) atau Induk menunjukkan bahwa tipe pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal tersebut menunjukkan bahwa DOB yang merupakan daerah hasil pemekaran dari kabupaten induk mendapatkan kualitas audit yang lebih baik daripada daerah induk. Variabel GPD yang berpengaruh positif terhadap kualitas audit mengindikasikan bahwa pemerintah daerah yang terletak di pulau Jawa memiliki kualitas audit LKPD yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang terletak di luar Jawa. Kualitas audit yang diukur dengan jumlah temuan audit mengindikasikan bahwa semakin banyak jumlah temuan yang terdapat diluar Jawa dikarenakan perkembangan pertumbuhan perekonomian yang tidak merata, sehingga menunjukkan kesenjangan baik dari segi kemampuan perekonomian maupun sumber daya manusianya.

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas audit LKPD di Indonesia dilihat dari perspektif karakteristik pemerintah daerah dan auditor. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa karakteristik pemerintah daerah (ukuran pemerintah daerah dan kompleksitas pemerintah daerah) dan karakteristik auditor (kemahiran profesional auditor) berpengaruh terhadap kualitas audit LKPD. Variabel kontrol yang terdiri dari status dan tipe geografis pemerintah daerah dalam penelitian ini juga

mempengaruhi kualitas audit LKPD. Akan tetapi variabel kontrol yang berupa tipe pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa selain dari auditor itu sendiri, faktor eksternal seperti karakteristik pemerintah daerah juga dapat mempengaruhi hasil kualitas audit terhadap LKPD di Indonesia.

### **B. Keterbatasan**

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan, dikarenakan keterbatasan tersebut maka berdampak terhadap hasil penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pengukuran kualitas audit yang hanya menggunakan data dari laporan keuangan auditan yaitu berupa temuan audit, sehingga dalam praktek secara langsung data keuangan tidak mungkin bisa mencerminkan kualitas audit yang sebenarnya. Untuk pengukuran variabel dari karakteristik auditor sendiri hanya berdasarkan data sekunder saja, sehingga masih belum bisa mewakili karakteristik dari auditor itu sendiri.

### **C. Saran**

Pengukuran kualitas audit dalam penelitian ini berdasarkan temuan audit, hal ini berarti bahwa pengukuran temuan audit dalam laporan keuangan menunjukkan adanya peningkatan dari kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah semakin baik. Oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan pengukuran yang lebih baik berdasarkan teknik kuesioner dan wawancara langsung terhadap auditor yang melakukan tugas audit laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan melakukan teknik kuesioner dan wawancara maka peneliti akan lebih mengetahui kualitas audit LKPD itu sendiri.

Selain itu untuk penelitian kedepan mungkin bisa lebih banyak menambahkan variabel independen mengenai karakteristik audit, bisa ditinjau dari segi independensi atau komitmen auditor terhadap audit LKPD.

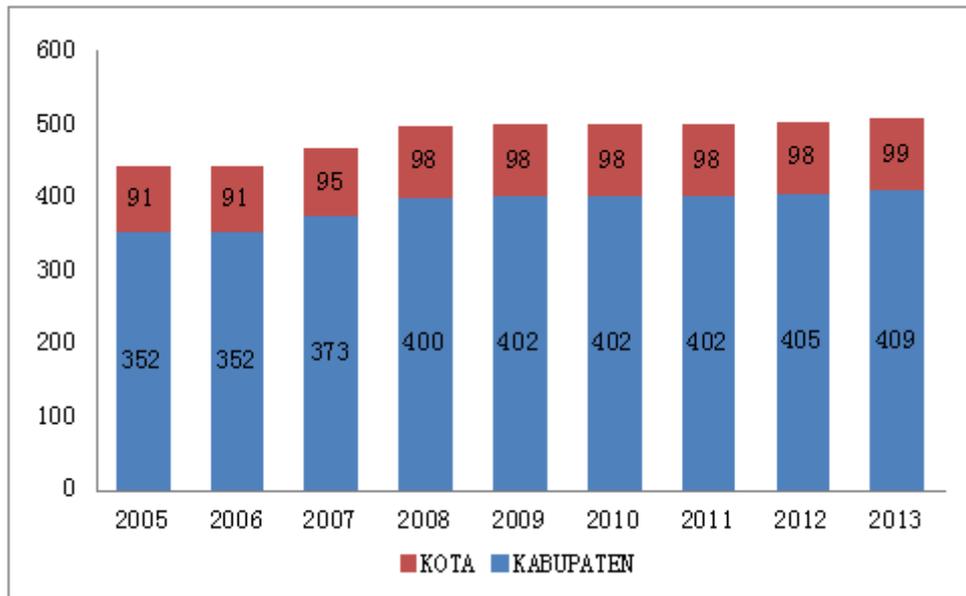
## DAFTAR PUSTAKA

- Arifianti, Hermin et al. 2013. Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVI Manado*.
- Batubara, Rizal Iskandar. 2008. Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Kecakapan Profesional, Pendidikan Berkelanjutan dan Independensi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan (Studi Empiris pada Bawasako Medan). *Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara*.
- DeAngelo, L. E. 1981a. Auditor Size and Audit Quality. *Journal of Accounting and Economics* 3(1): 167-175.
- Deis, D.R. dan Giroux, G.A. 1992. Determinants of Audit Quality in the Public Sector. *The Accounting Review*. 67(3): 462-479
- Eisenhardt, Kathleen M. 1989. Agency Theory: An Assessment and Review. *The Academy of Management Review* 14(1):57-74
- Francis, Jere R. 2004. What do we know about audit quality? *The British Accounting Review*. 36: 345-368
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi 5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Giroux, Gary and Jones Rowan. 2011. Measuring audit quality of local governments in England and Wales. *Research in Accounting Regulation*. 23: 60-66
- Halim, Abdul dan Abdullah, Syukriy. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi). *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. 2(1):53-64
- Ingram, Robert W. 1984. Economic Incentives and Choice of State Government Accounting Practices. *Journal of Accounting Research* 22 (1): 126-144

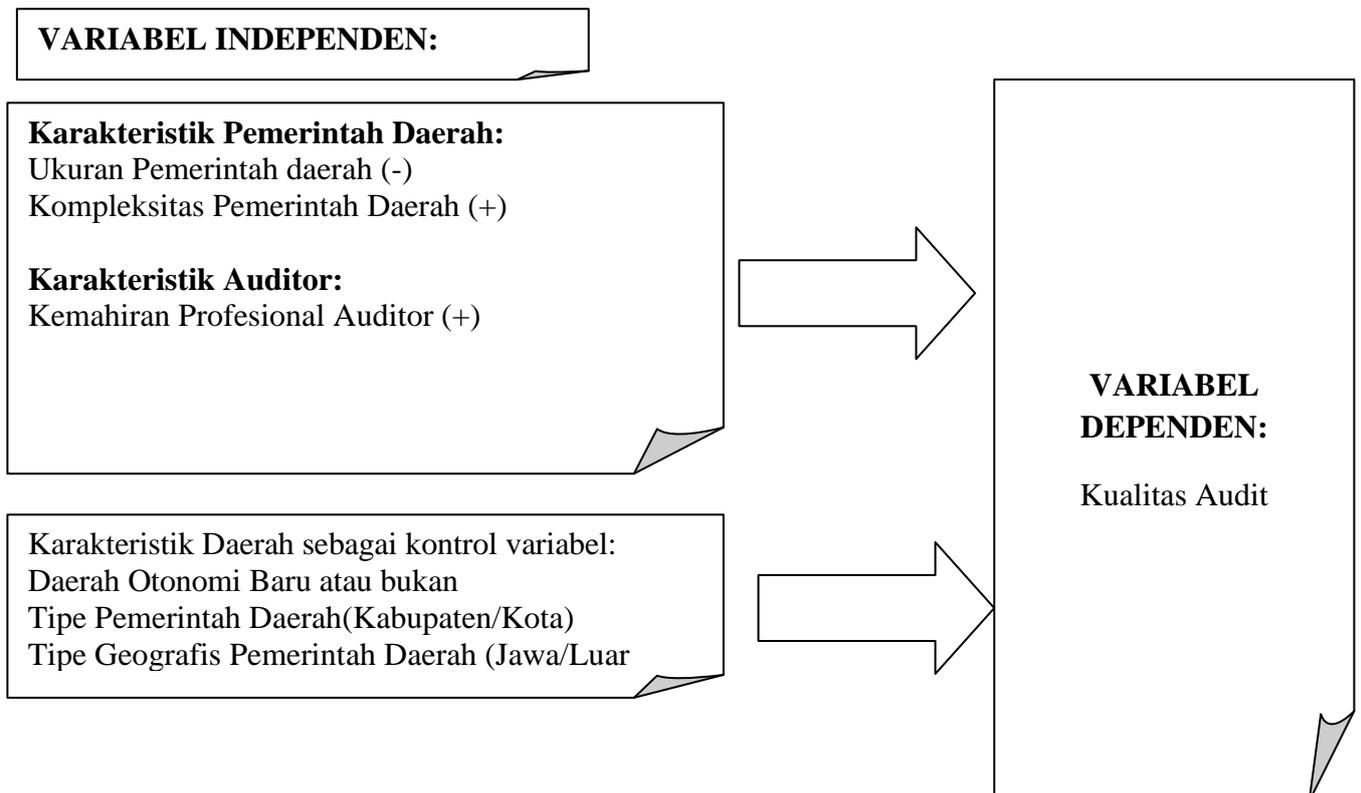
- Jensen, Michael C dan William H Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*.3: 305-360.
- Johnson, Lynn A. 2006. The effect of audit scope and auditor tenure on resource allocation decisions in local government audit engagements. *Accounting Forum* 30:105-119
- Lu, Tong. 2006. Does Opinion Shopping Impair Auditor Independence and Audit Quality?. *Journal Of Accounting Research* 44 (3): 561-583
- Lubis, Haslinda. 2009. Pengaruh Keahlian, Independensi, Kecakapan Professional dan Kepatuhan pada Kode Etik Terhadap Kualitas Auditor pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. *Universitas Sumatera Utara*.
- Mardisar, Diani dan Sari, Ria Nelly. 2007. Pengaruh Akuntabilitas dan Pengetahuan Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X Makassar*.
- Mitnick, Barry M. 2006. *Origin of the Theory of Agency: An Account by One of the Theory's Originators*. Katz Graduate School of Business. University of Pittsburgh
- Moe, Terry M. 1984. The New Economics of Organization. *American Journal of Political Science*. 28 (4): 739-777.
- Mustikarini, Widya A dan Fitriarsari, Debby. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. *Universitas Indonesia*
- Patrick, P.A. 2007. The Determinant of Organizational Inovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government. Unpublished Ph.D Dissertation. *Pennsylvania: The Pennsylvania State University*.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No.01 Tahun 2007. *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Badan Pemeriksa Keuangan.
- Perdani, Annisa dan Suranta, Sri. 2013. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Investigatif Pada Kantor Perwakilan BPK-RI Yogyakarta. *Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret*.
- Puspita, Rora dan Martani, Dwi. 2012. Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi Dalam Website Pemda. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XV Banjarmasin*.
- Puspita, Rora dan Martani, Dwi. 2012. Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi Dalam Website Pemda. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XV Banjarmasin*.

- Robert, Robin W et al. 1990. Determinants of Auditor Change in the Public Sector. *Journal of Accounting Research*. 28 (1):220-228
- Ross, Stephen A. 1973. The Economic Theory of Agency: The Principal's Problem. *American Economic Association*. 63(2): 134-139
- Setyaningrum, Dyah. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit BPK-RI. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XV Banjarmasin*.
- Singgih, Elisha M dan Bawono Icut R. 2010. Pengaruh Independensi, Pengalaman, Due Professional Care, dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit (Studi pada Auditor di KAP "Big Four" di Indonesia). *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*.
- Suhardjanto, Djoko et. al. 2010. Influence of Parliament Characteristics toward Mandatory Accounting Disclosure Compliance in Indonesia. *Hibah Penelitian Publikasi Internasional LP2M UNS*.
- Suhardjanto, Djoko dan Yulianingtyas, Rena R. 2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Daerah terhadap Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia). *Jurnal Akuntansi & Auditing*. 8:1-94
- Sutaryo dan Winarna, Jaka. 2013. Karakteristik DPRD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Dukungan Empiris dari Perspektif Teori Keagenan. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVI Manado*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara*. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Jakarta.

LAMPIRAN



Gambar I.1: Jumlah Pemekaran Kabupaten/ Kota dari Tahun 2005-2013 (Diolah Berdasarkan Data dari Website Kementerian Dalam Negeri, (<http://otda.kemendagri.go.id/>))



**Gambar 2.1: Kerangka Pikir Penelitian**

**Tabel III.1**

**Kriteria Pengambilan Sampel**

No.	Keterangan
1.	Pemerintah daerah Kabupaten/Kotamadya seluruh Indonesia yang menerbitkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2011.
2.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mencantumkan seluruh data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengukuran variabel dan analisis data untuk pengujian hipotesis dalam penelitian.

**Tabel III.2**

**Variabel Penelitian**

No.	Variabel	Jenis Variabel	Akronim	Definisi Operasioanl
1.	Kualitas Audit	Dependen	QA	Rasio antara jumlah temuan dibagi dengan totalaset pemerintah daerah
2.	Ukuran Pemerintah Daerah	Independen	UPD	Logaritma Natural dari total aset dalam LKPD
3.	Kompleksitas Pemerintah Daerah	Independen	KPD	Jumlah SKPD
4.	Kemahiran Profesional Auditor	Independen	KPA	Variabel dummy yang diukur dengan 1 yang memiliki Sertifikasi Akuntansi yang dimiliki (CPA,CFSA, CFO) dan 0 untuk sebaliknya
5.	Status Pemerintah Daerah	Kontrol	SPD	Variabel dummy yang diukur dengan 1 untuk DOB dan 0 untuk Induk
6.	Tipe Pemerintah Daerah	Kontrol	TPD	Variabel dummy yang diukur dengan 1 untuk Kabupaten dan 0 untuk Kota
7.	Tipe Geografis Pemerintah Daerah	Kontrol	GPD	Variabel dummy yang diukur dengan 1 untuk luar pulau Jawa dan 0 untuk pulau Jawa

**Tabel IV.1**

**Sampel dan Observasi dalam Penelitian**

Keterangan	Sampel
Jumlah Observasi dalam penelitian dengan menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2011	508

Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan data terkait yang tidak lengkap	(115)
Jumlah Observasi dalam penelitian yang digunakan	393

**Tabel IV.2**  
**Hasil Statistik Deskriptif**

Keterangan	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
QA	393	,00	,31	,0069	,02136
UPD	393	31429353297,99	33441086637722,40	2038432737856,5708	2462368898892,63000
KPD	393	16,00	219,00	51,3511	23,30299
KPA	393	,00	1,00	,1272	,33365
SPD	393	,00	1,00	,3893	,48822
TPD	393	,00	1,00	,8270	,37875
GPD	393	,00	1,00	,7812	,41398
Valid N (listwise)	393				

Keterangan:

UPD: Ukuran Pemerintah Daerah, KPD: Kompleksitas pemerintah daerah, KPA: Kemahiran Profesional Auditor, SPD: Status Pemerintah Daerah, TPD: Tipe Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota), GPD: Tipe Geografis Pemerintah Daerah (Jawa/Luar Jawa)

Sumber: Data Sekunder yang Diolah

**Insert Tabel IV.3**  
**Uji Asumsi Klasik**

Uji	N	K-SZ	Tolerance	VIF	Sig
Normalitas	393	5,651			0,000
Normalitas	229	1,173			0,128
Autokolerasi	229				0,055
Heterokedastisitas	229				
UPD					0,160
KPD					0,154
KPA					0,398
SPD					0,185
TPD					0,054
GPD					0,454
Multikolonieritas	229				
UPD			0,740	1,351	
KPD			0,889	1,125	
KPA			0,960	1,042	
SPD			0,777	1,288	
TPD			0,894	1,119	
GPD			0,797	1,255	

Keterangan:

UPD: Ukuran Pemerintah Daerah, KPD: Kompleksitas pemerintah daerah, KPA: Kemahiran Profesional Auditor, SPD: Status Pemerintah Daerah, TPD: Tipe

Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota), GPD: Tipe Geografis Pemerintah Daerah (Jawa/Luar Jawa)

Sumber: Data Sekunder yang Diolah

**Tabel IV.4**

**Hasil Uji Regresi Kualitas Audit**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	,000	7	,000	13,968	,000 <sup>b</sup>
Residual	,000	221	,000		
Total	,000	228			

Sumber: Data Sekunder yang Diolah

**Tabel IV.5**

**Hasil Uji Signifikansi Parameter**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,554a	,307	,285	,00084701	1,905

Sumber: Data Sekunder yang Diolah

**Tabel IV.6**

**Hasil Uji Signifikansi Parameter**

**Coeffisiens**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,014	,003		4,808	,000
UPD	-,001	,000	-,310	-4,767	,000**
KPD	9,957E-006	,000	,215	3,615	,000**
KPA	,001	,000	,155	2,705	,007**
SPD	,000	,000	,117	1,834	,068*
TPD	,000	,000	-,095	-1,597	,112
GPD	,001	,000	,291	4,646	,000**

Keterangan: \*\*Sig. 5%, \*Sig. 10%  
 QA:Kualitas Audit, UPD: Ukuran Pemerintah Daerah, KPD: Kompleksitas pemerintah daerah, KPA: Kemahiran Profesional Auditor, SPD: Status Pemerintah Daerah, TPD: Tipe Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota), GPD: Tipe Geografis Pemerintah Daerah (Jawa/Luar Jawa)

Sumber: Data Sekunder yang Diolah